

**FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

Dewi Sarifah Tullah¹, Erma Apriyanti², Emi Suryati³

¹STIE Pandu Madania, dewisarifatullah@gmail.com

²STIE Pandu Madania, apriyantierma@yahoo.co.id

³STIE Pandu Madania, emy_suryati@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh system pengendalian intern, *Good Government Governance* dan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Unit Analisis dalam penelitian ini pada pemerintah daerah di provinsi jawa barat dan banten. Sampel dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan adalah 34 sample dengan tingkat kesalahan 5%. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode Analisis data menggunakan uji validitas dan reliabilitas, analisis data regresi linear berganda, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas), uji t, dan analisis koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa system pengendalian intern dan kualitas SDM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Intern, *Good Government Governance*, Kualitas SDM, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of internal control systems, Good Government Governance and Human Resources Quality on the quality of local government financial reports in the Provinces of West Java and Banten. The Unit of Analysis in this study was the local government in the provinces of West Java and Banten. The sample in this study was the Regional Financial Management Agency in the Provinces of West Java and Banten. In this study, the number of samples used was 34 samples with an error rate of 5%. Data collection techniques using a questionnaire. Methods of data analysis using validity and reliability tests, multiple linear regression data analysis, classic assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity), t tests, and coefficient of determination analysis (R^2). The results of this study indicate that the internal control system and Human Resources Quality do not have a significant effect on the quality of local government financial reports, while Good Government Governance affects the quality of local government financial reports.

Keywords: Internal Control System, Good Government Governance, Human Resources Quality, Quality of Financial Statements

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah dan pemegang kekuasaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 yang disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturannya setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibutuhkan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN berupa laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk LKPD, LKPD harus mengikuti SAP sesuai peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 agar lebih akuntabel dan mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Taharia Syafrudin (2012), rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memadai (SAP), penyelenggaraan sistem pengendalian intern (SPI) yang belum memadai, kurangnya kompetensi sumberdaya manusia yang memadai (SDM), dan kurang ditaatinya ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan BPK dari tahun 2010-2014, menunjukkan bahwa di tahun 2014 BPK memeriksa 504 entitas (93,51%) LKPD dari 539 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan. Hasil pemeriksaan BPK 5 tahun terakhir tersebut masih terdapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 230 (45,64%) LKPD, Opini Tidak Wajar (TW) atas 4 (0,79%) LKPD, dan opini TMP (Tidak Memberikan Pendapat) atas 19 (3,77%) LKPD. Capaian LKPD ini di bawah target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas seluruh LKPD pada tahun 2014. Akan tetapi, secara keseluruhan pada semester 1 Tahun 2014, pemerintah provinsi memiliki persentase LKPD yang memperoleh opini WTP paling tinggi, yaitu 76,47% dibandingkan dengan pemerintah kota dan kabupaten, yaitu 63,21% dan 44,38%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPD dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, mengalami peningkatan yang signifikan terhadap laporan keuangan. Tetapi masih banyaknya laporan keuangan yang mendapat penilaian opini selain WTP. Fenomena tersebut merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut (www.bpk.go.id-IHPS semester 1 tahun 2015).

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas 504 LKPD Tahun 2014 yang dilaporkan dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2015 menunjukkan adanya 5,978 kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang terdiri atas dua kelompok temuan yaitu: kelemahan sistem pengendalian intern dan pelaporan sebanyak 2.222 (37,17%) kasus. Secara umum permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut masih banyak ditemukan dalam pengelolaan akun pendapatan dan belanja, permasalahan itu terjadi karena pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan (www.bpk.go.id-IHPS semester 1 tahun 2015).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), Pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terwujudnya *good governance* mewajibkan setiap satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Sari, 2013).

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Sunarsip (2001) mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola pemerintahan yang buruk (*Good Government Governance*), pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Bahwa peran profesi akuntan selama ini masih belum optimal dalam mewujudkan *good government governance*. Oleh karena itu tuntutan terhadap terwujudnya *good government governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) sangat diperlukan, baik oleh perusahaan bisnis manufaktur maupun non-manufaktur.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern dan *Good Government Governance* dan kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mahmudi (2011) mengemukakan bahwa “Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat *incidental* dan *responsive* atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus”.

Menurut Mulyadi (2008) menyatakan bahwa “Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Pengertian *Good Government Governance*

Menurut Mardiasmo(2008:18) *Good government Governance* diartikan sebagai kepemimpinan yang baik. *World Bank* mendefinisikan *Good Government Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrativ* menjalankan disiplin anggaran serta *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Menurut *United Nations Developmen Programe* (UNDP 1997) *Good government Governance* merupakan sebuah dialog yang melibatkan seluruh partisipan, sehingga setiap orang merasa terlibat dalam urusan pemerintahan. Tanpa kesempatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersebut.

Pengertian Laporan Keuangan

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya, sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan keuangan selain sebagai alat untuk memberikan informasi keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan (Mahmudi ,2011:143).

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Bahtiar (2009:41-43), tujuan umum dari suatu akuntansi baik dalam bisnis maupun pemerintahan adalah menyediakan informasi keuangan bagi para penggunanya untuk pengambilan keputusan. Didalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah, karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi relevansi (*relevance*), keandalan (*reliability*), dapat dibandingkan (*comparability*) dan dapat dipahami (*understandability*).

1. Relevan (*relevance*)

Informasi laporan keuangan dikatakan relevan, apabila informasi tersebut dapat digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan. Dengan demikian informasi dalam laporan keuangan biasa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

2. Keandalan (*reliability*)

Informasi dalam laporan keuangan dikatakan andal atau dapat diandalkan (*reliable*) apabila pengguna pelaporan keuangan dapat mengandalkan informasi yang menggambarkan kondisi ekonomi atau kejadian-kejadian. Informasi tersebut berarti netral yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kata secara jujur (*faithful representation*), serta dapat diverifikasi (*verifiability*), hubungan relevansi dan keandalan sangatlah penting. Informasi mungkin relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3. Dapat dibandingkan (*comparability*)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini memungkinkan pengguna untuk membandingkan persamaan dan perbandingan persamaan dan perbedaan informasi keuangan baik secara waktu maupun entitasnya. Informasi laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan apabila kebijakan akuntansi yang diterapkan sama dari tahun ketahun atau antar entitas. Oleh karena itu, apabila terjadi perubahan kebijakan akuntansi maka, pengaruh perubahan tersebut harus dapat diungkapkan dalam rangka mempermudah perbandingan tersebut. Sebagai contoh, apabila suatu kementerian menggunakan metode saldo menurun maka perubahan tersebut harus diberikan alasan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

4. Dapat dipahami (*understandability*).

Karakteristik kualitatif ini merupakan ukuran kegunaan informasi laporan keuangan bagi pengguna. Apabila informasi tersebut tidak dapat dipahami pengguna maka informasi tersebut menjadi tidak ada gunanya. Untuk itu, informasi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang umum diterima atau sesuai dengan batas pemahaman para pengguna. Disisi lain, mengingat beragamnya pengguna, maka pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi yang terkait.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sistem Pengendalian Intern di tuangkan dalam COSO (1992) menekankan bahwa konsep fundamental dinyatakan dalam beberapa definisi antara lain pengendalian intern dilaksanakan oleh orang dan pengendalian intern dapat diharapkan untuk menyediakan keyakinan yang memadai. Begitu juga dengan Didi Widayadi menyatakan bahwa SPI oleh pemerintah adalah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Menurut Hamdani (2011) menyebutkan dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan menurut

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

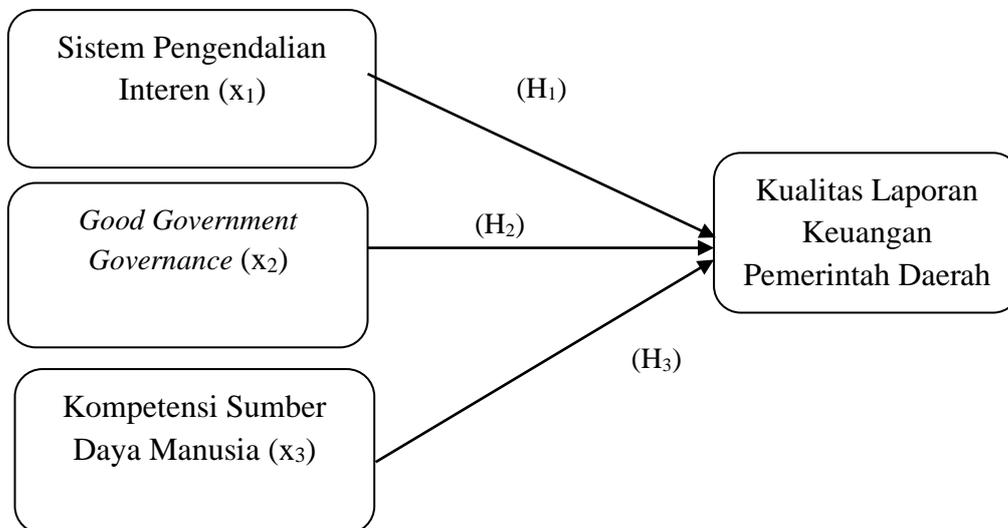
Nugraha (2010) menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern dapat memperkuat dihasilkannya laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Pengaruh *Good government Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Mardiasmo (2008) *Good government Governance* diartikan sebagai kepemimpinan yang baik. *Word Bank* mendefinisikan *Good government Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien penghindaran salah alokasi dan investasi.

Penelitian Kantu (2015) membuktikan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila instansi menerapkan prinsip-prinsip *good governance* maka kualitas laporan keuangan instansi tersebut akan terus meningkat.

Hal tersebut juga dibuktikan dalam penelitian Rosdiani (2011) bahwa penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Serta dalam penelitian Novatiani dan Jeanny Fatimmah (2012) yang membuktikan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan Pemikiran di atas, maka kerangka konseptual dapat disajikan gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- H₁ = Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₂ = *Good Government Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- H₃ = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini terdapat dua variabel yang akan di kaji yaitu variabel bebas (*independen variable*) di antaranya sistem pengendalian intern, *Good Government Governance* dan Kualitas SDM. Variabel terikat (*dependent Variable*) adalah kualitas laporan keuangan

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

pemerintah daerah. Metode penelitian ini terdiri dari desain penelitian, operasional variabel, metode pengumpulan data, prosedur pengumpulan data dan metode analisis data.

Uji validitas digunakan untuk menghitung korelasi antara masing-masing pernyataan dengan skor total dengan rumus korelasi product moment. Uji validitas dilakukan menggunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut;

$$r_{xy} = \frac{n \sum (xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Dimana :

- r = koefisien korelasi *product moment*
- x = skor setiap item pertanyaan
- y = skor sub total dari semua item pertanyaan
- n = jumlah responden

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji reliabilitas adalah suatu indeks yang menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001). Keandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, dan analisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menguraikan tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan *Good Government Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. analisis regresi adalah analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas yaitu sistem pengendalian intern, dan *good government governance* terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 for windows,

Tabel 1. Hasil Uji t

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 11.473 | 5.148 | | 2229 | .033 |
| SPI | -4063 | 073 | -.115 | -868 | .392 |
| KSM | -.049 | .116 | -.056 | -.424 | .674 |
| GCG | .313 | .059 | .706 | 5.316 | .000 |

Sumber : *Output SPSS 16*

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas, maka dapat disimpulkan bahwa.

- Berdasarkan *output* dengan menggunakan SPSS *for windows* pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh dengan hasil $t_{hitung} - .115$ dengan nilai sig $0,392 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Pengaruh kompetensi sumber daya manusia diperoleh dengan hasil t_{hitung} sebesar -056 dengan nilai sig 0.647 . Karena nilai sig $0.647 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Pengaruh *Good government governance* diperoleh dengan hasil t_{hitung} sebesar 5.316 dengan nilai sig $0,000$. Karena nilai sig $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen Nilai (R^2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independennya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Koefisien determinasi yang digunakan adalah *Adjusted R Square* lebih dapat dipercaya dalam mengevaluasi model regresi. Nilai *adjusted R Square* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan kedalam model. Hasil perhitungan determinasi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .697 ^a | .485 | .437 | 3.473 | 1.827 |

Sumber : *Output SPSS 16*

Dari hasil perhitungan diperoleh hasil bahwa variabel independen terhadap variabel dependennya yang di jelaskan oleh model persamaan ini sebesar 43,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia dan *good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh model persamaan ini sebesar 43,7% dan sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu : efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk lingkup pemerintah Indonesia

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

pengendalian intern Pemerintah. Di dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian intern sebesar -4063, t_{hitung} -868 dengan nilai signifikansi sebesar 0.392 maka nilai tidak signifikansi pada tingkat -868 karena lebih besar dari α (0.05). Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini senada dengan hasil penelitian dari Diana Sari (2013) yang menyatakan bahwa penyebab lemahnya implementasi sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada umumnya terjadi karena pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur. Selain itu, para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab lalai, atau tidak cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan tugas. Kelemahan SPI yang lain meliputi pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan dan belum adanya koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

Pengaruh *Good Government governance* terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variabel *good government governance* sebesar 0.313 t_{hitung} 5.316 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 maka nilai signifikansi pada tingkat 5.316 karena lebih besar dari α (0.05). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak. Hal ini berarti bahwa *good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghasilkan suatu pelaporan keuangan yang berkualitas selain mematuhi undang-undang yang berlaku suatu pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya juga harus menerapkan prinsip-prinsip *good government governance* sehingga terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini senada dengan yang diteliti Azlim, Darwanis Usman Abu Bakar (2012).

Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi handayani (2012) "Pengaruh *Good government governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel *Good government governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variable kompetensi sumber daya manusia dengan hasil t_{hitung} sebesar -056 dengan nilai sig 0.647. Karena nilai sig 0.647 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, kualitas Sumber Daya Manusia bukan merupakan factor penentu dari kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Pemda).

PENUTUP

Sistem pengendalian intern dan kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sementara, *Good government governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dan banten.

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

Adapun saran dari penelitian ini adalah sitem pengendalian intern perlu ditingkatkan lagi dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja, melakukan pengelolaan kegiatan rutin terkait dalam pelaksanaan tugas pemantauan. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian pada kabupaten dan kota di wilayah Pulau Jawa sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.

REFERENSI

- Agoes, Sukrisno. (2008). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan)* oleh kantor Akuntan Publik. Jilid 11. Jakarta: LPFE UI.
- Amirullah. 2002. *Perilaku Konsumen*, edisi pertama, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azlim Darwanis, 2012 *Pengaruh penerapan Good Government Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan*, jurnal Akuntansi, Volume 1. No 1 Agustus 2012.
- Boulter 1996 *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat
- Badan Pemeriksa Keuangan, *Ihtisar hasil Pemeriksaan Semester I*. 2015 Jakarta
- Bastian 2008. *Sistem Akuntansi Sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bahtiar . 2009. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta .Akademia.
- Devi Roviyantri 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Siatem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah* (survai pada Kabupaten Tasik Malaya jurnal Accounting. Vol.1.No.1
- Gitasudarmo, Indriyo dan I Nyoman sudita. 2008. *Perilaku Organisasi*, edisi pertama. Yogyakarta: BPFE, Yogyakarta.
- Hutapea dan Thoha (2008), *Kompetensi plus : Teori, Desain, Kasus dan penerapan untuk HR dan Organisasi Yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama .
- Harry Azhar ([http : www. Antara news. Com](http://www.Antara.news.Com)). Diakses pada 20 februari 2016
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Jakarta*: Salemba Empat.
- Indriasari (2008). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, pemanfaatan teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Daerah . jurnal SNA XI. Pontianak.*
- Kasmir , Sofyan Harapah 2010 . *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo : Alfabeta.
- Kantu. (2015) *Pengaruh penerapan Good Government Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Gorontalo*. Jurnal akuntansi Indonesia.
- Leora kleper. (2004). *journal of corporate finance volume 10 (5)*
- Mahmudi. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah* . Jakarta Erlangga.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Meyi. (2016). *The Impact of Corporate Governance Practice on Firms' Financial Performance*. *ASEAN Economic Bulletin (21) 308-318*
- Mardiasmo (2008) *Achieving Good Governance Through E-Governance*. Jurnal EBSCO. Orisa.
- Mahmudi 2011 *Manajemen Keuangan Derah* Jakarta : Erlangga.
- Mahmudi . 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* . Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo . 2002. *Akuntansi Sektor Publik* . Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.
- Prihadi, 2004. *Kinerja, Aspek pengukuran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

JURNAL AKUNTANSI, Vol. 8, No. 2, November (2019)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Srilastanti (2005) Tinjauan terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi atas Skandal Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Auditing dan informasi* Vol.5 No. 1 April 2005.
- Syarifudin (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan variable intervening Sistem Pengendalian Intern pemerintah* (studi empiris pada pemkab kebumen)
- Saifudin, Boyatzis, Rue. 2008. *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia* . Yogyakarta
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Cetakan Kedua Alumni: Bandung.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta : Kencana prenda Media Group.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Cetakan Kedua Alumni: Bandung.
- Siagian (2002) *Teori pengembangan organisil* . Jakarta
- Taharia Syafrudin ([http : // Pikiran Rakyat . com/node](http://PikiranRakyat.com/node)) diakses pada tanggal 16 Mei 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Winidyaningrum dan Rahmawati (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua Bandung: Alfabeta